

TRANSFORMASI MAKNA PANCASILA DARI ORDE LAMA KE REFORMASI: STUDI WACANA IDEOLOGI NEGARA

Try Widya Andini¹, Naina Ikhdina Hapiz², Qesya Balqis Lubis³, Zaskia Putri
Andari⁴, Shintya Akrima⁵, Sri Yunita⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan

¹trywidya.2243210017@mahasiswa.unimed.ac.id

ABSTRACT

Pancasila as the state ideology of Indonesia possesses a dynamic character, with its meaning continuously transforming in response to changing historical, political, and social contexts. This study aims to analyze the shifts in the meaning of Pancasila across different periods of governance in Indonesia. The research employs a qualitative approach using critical discourse analysis through a literature review. The findings indicate that during the early period of independence, Pancasila functioned as a common platform for national integration. During the Old Order and New Order eras, Pancasila underwent ideological consolidation and was utilized as an instrument of political legitimacy and control through a predominantly singular interpretation. In contrast, the Reform Era repositions Pancasila as an open ideology that allows for a plurality of interpretations, although its implementation continues to face various challenges. This study affirms that Pancasila is an ideological construct that is continuously negotiated within the interplay of language, power, and social practices.

Keywords: Pancasila, ideology, transformation of meaning, critical discourse analysis

ABSTRAK

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki sifat dinamis yang maknanya terus mengalami transformasi seiring perubahan konteks historis, politik, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna Pancasila dalam berbagai periode pemerintahan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis wacana kritis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai *common platform* untuk integrasi nasional. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila mengalami ideologisasi dan digunakan sebagai instrumen legitimasi serta kontrol politik melalui penafsiran yang cenderung tunggal. Sementara itu, pada era Reformasi, Pancasila kembali dimaknai sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan pluralitas interpretasi, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan konstruksi ideologis yang terus dinegosiasikan dalam relasi antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial.

Kata kunci: Pancasila, ideologi, transformasi makna, wacana kritis

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Republik Indonesia yang secara konstitusional

termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai

landasan normatif dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai orientasi nilai dalam kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia (Nasoha et al., 2024). Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, Pancasila memuat sistem gagasan yang menjadi kerangka berpikir kolektif sekaligus legitimasi moral bagi praktik kekuasaan.

Secara konseptual, ideologi negara merupakan seperangkat nilai, gagasan, dan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk arah kebijakan serta pola relasi antara negara dan masyarakat. Aurora (2024) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki dimensi filosofis dan politis yang menjadikannya sebagai identitas nasional sekaligus sumber legitimasi kekuasaan. Dalam perspektif ini, ideologi negara memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sistem integratif yang menyatukan keberagaman sosial, budaya, dan politik, serta sebagai instrumen legitimatif bagi kekuasaan (Riantono, 2021).

Secara historis, Pancasila lahir melalui proses dialog dan kompromi politik yang melibatkan berbagai kelompok ideologis pada masa perumusan kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila sejak awal dimaksudkan sebagai titik temu (common platform) yang mampu mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pancasila tidak selalu dimaknai secara tunggal dan stabil. Tafsir terhadapnya terus mengalami dinamika yang sejalan dengan perubahan konfigurasi politik dan struktur kekuasaan negara.

Dinamika tersebut tampak jelas dalam berbagai periode pemerintahan. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, Pancasila diproyeksikan sebagai simbol integrasi nasional dalam konteks pluralitas ideologi. Memasuki era Orde Baru di bawah Soeharto, Pancasila mengalami institusionalisasi yang lebih sistematis melalui kebijakan asas tunggal dan program pembinaan ideologi negara. Aurora (2024) menunjukkan bahwa pada masa ini terjadi dominasi tafsir resmi negara yang cenderung membatasi ruang interpretasi

alternatif. Sementara itu, era Reformasi menghadirkan perubahan signifikan dengan munculnya pluralitas tafsir yang lebih terbuka dalam ruang publik. Aritonang (2023) menegaskan bahwa perubahan ini juga tercermin dalam reinterpretasi nilai-nilai Pancasila, termasuk sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengalami transformasi makna sesuai dengan dinamika sosial dan politik.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma konstitusional, tetapi juga sebagai objek konstruksi wacana yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan dinamika sosial. Dalam perspektif wacana ideologi, ideologi tidak dipahami sebagai seperangkat nilai yang statis, melainkan sebagai konstruksi diskursif yang terus diproduksi dan direproduksi melalui praktik bahasa, kebijakan publik, serta narasi politik. Riantono (2021) menegaskan bahwa perubahan tafsir Pancasila tidak hanya terjadi pada tingkat kebijakan formal, tetapi juga melalui cara negara mengartikulasikan dan menyosialisasikan ideologi tersebut kepada masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Pancasila sering kali berkorelasi dengan orientasi kekuasaan rezim yang berkuasa (Riantono, 2021). Pancasila dalam satu konteks dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, namun dalam konteks lain juga menjadi instrumen legitimasi politik. Penelitian Nasoha et al. (2024) memperlihatkan bahwa implementasi Pancasila pada setiap era pemerintahan memiliki perbedaan pendekatan, baik secara konseptual maupun dalam praksis kebijakan. Sementara itu, kajian normatif-politik menempatkan Pancasila sebagai pedoman etika dan sistem nilai dalam penyelenggaraan negara (Aurora, 2024), serta tetap relevan dalam menjaga keseimbangan antara identitas religius dan prinsip kebangsaan (Aritonang, 2023).

Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek historis dan normatif. Kajian yang secara khusus menempatkan Pancasila sebagai wacana ideologis yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik bahasa serta komunikasi politik lintas rezim masih relatif terbatas. Padahal, dalam

realitas kontemporer, ideologi negara tidak hanya hadir dalam dokumen resmi, tetapi juga dalam narasi politik, pendidikan, media massa, dan ruang publik yang lebih luas.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memandang Pancasila sebagai entitas ideologis yang maknanya dibentuk melalui relasi antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial. Dengan demikian, transformasi tafsir Pancasila dari Orde Lama hingga Reformasi dapat dipahami sebagai proses diskursif yang berlangsung dalam hubungan antara negara, masyarakat, dan struktur kekuasaan. Perspektif ini penting untuk menghindari pemahaman yang ahistoris serta menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang dinamis dan kontekstual.

Untuk mengkaji hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan historis-kritis dan analisis wacana. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk menelusuri perkembangan makna Pancasila dalam konteks sejarah politik Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sementara itu, analisis

wacana digunakan untuk mengkaji bagaimana Pancasila direpresentasikan, ditafsirkan, dan diproduksi dalam teks-teks resmi negara, pidato politik, serta kebijakan publik. Sumber data penelitian berupa data sekunder yang meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen sejarah politik yang relevan, dengan teknik analisis berupa interpretasi historis dan identifikasi pola wacana ideologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi makna Pancasila dari era Orde Lama hingga Reformasi melalui pendekatan studi wacana ideologi negara. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana perubahan struktur kekuasaan memengaruhi konstruksi makna Pancasila serta implikasinya terhadap posisi ideologi negara dalam kehidupan demokrasi Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman mengenai relasi antara ideologi, kekuasaan, dan dinamika sejarah politik Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pancasila sebagai ideologi negara pada fase awal kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari konteks historis pembentukannya yang sarat dengan negosiasi ideologis dan kepentingan politik yang beragam. Dalam perspektif historis-kritis, Riantono (2021) memandang bahwa lahirnya Pancasila merupakan hasil kompromi politik yang merepresentasikan titik temu antara kelompok nasionalis, religius, dan golongan lainnya yang memiliki orientasi berbeda mengenai dasar negara. Proses kompromi ini bukan sekadar peristiwa politis, melainkan juga mencerminkan konstruksi ideologis yang dibentuk melalui dialog intensif antar-elit bangsa dalam merumuskan identitas nasional yang inklusif.

Dalam konteks tersebut, Pancasila sejak awal tidak dimaksudkan sebagai ideologi yang bersifat eksklusif atau dogmatis, melainkan sebagai kerangka normatif yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Sebagai *common platform*, Pancasila berfungsi mengintegrasikan pluralitas sosial, budaya, dan keagamaan ke dalam satu kesatuan politik. Hal ini

menunjukkan bahwa sejak awal, Pancasila memiliki karakter sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan terjadinya interpretasi yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.

Lebih lanjut, Nasoha et al. (2024) menekankan bahwa Pancasila pada fase ini berfungsi sebagai *social ethic* yang mengandung seperangkat nilai fundamental dalam mengatur relasi sosial, politik, dan moral. Dalam pengertian ini, Pancasila tidak hanya berfungsi secara formal sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga menjadi instrumen praksis dalam membangun kohesi sosial di tengah kondisi pascakolonial yang penuh tantangan.

Dalam kerangka ini, makna Pancasila pada fase awal kemerdekaan lebih menekankan fungsi integratif dan legitimatif. Pancasila menjadi alat untuk membangun legitimasi negara sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa legitimasi tersebut bersifat konsensual, bukan koersif, karena

didasarkan pada kesepakatan bersama antar kelompok masyarakat.

Memasuki masa Orde Lama, makna Pancasila mulai mengalami transformasi yang signifikan. Dalam analisis Nasoha et al. (2024), periode ini ditandai oleh meningkatnya proses ideologisasi Pancasila dalam rangka konsolidasi kekuasaan dan pembentukan identitas nasional. Negara mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan dan mengarahkan makna Pancasila sesuai dengan orientasi politik yang berkembang saat itu.

Dalam praktiknya, Pancasila tidak lagi sekadar menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi instrumen ideologis yang digunakan untuk membangun legitimasi politik. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan simbol-simbol ideologi negara dalam retorika politik serta kebijakan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, terjadi pergeseran fungsi Pancasila dari ideologi konsensus menuju ideologi negara yang lebih bersifat direktif.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama menunjukkan

adanya kontradiksi antara norma dan praktik. Samekto dan Purwanti (2017) mengidentifikasi bahwa kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada periode ini berimplikasi pada melemahnya prinsip demokrasi deliberatif. Praktik politik yang berkembang justru cenderung mengabaikan prinsip musyawarah dan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sila keempat Pancasila.

Fenomena seperti pengangkatan presiden seumur hidup menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, munculnya konflik ideologis dan ketidakstabilan politik juga mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila belum berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, Pancasila mulai mengalami reduksi makna menjadi alat legitimasi kekuasaan dalam situasi politik yang tidak stabil.

Transformasi makna Pancasila mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, ketika ideologi ini diinstitusionalisasikan secara sistematis oleh negara. Aurora (2020) menjelaskan bahwa rezim Orde Baru berupaya mengukuhkan Pancasila sebagai satu-satunya asas melalui

kebijakan asas tunggal. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk memonopoli tafsir ideologi dan menghilangkan kemungkinan munculnya interpretasi alternatif.

Dalam kerangka teori wacana ideologi, kondisi ini menunjukkan adanya dominasi diskursif negara dalam produksi makna Pancasila. Negara tidak hanya mengatur aspek struktural, tetapi juga membentuk kesadaran ideologis masyarakat melalui berbagai mekanisme institusional. Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) menjadi salah satu instrumen utama dalam proses tersebut.

Riantono (2021) menilai bahwa melalui proses institusionalisasi tersebut, Pancasila mengalami perubahan dari ideologi yang bersifat dinamis menjadi doktrin yang statis. Proses indoktrinasi yang dilakukan secara sistematis menyebabkan Pancasila kehilangan sifat dialogisnya. Dalam situasi ini, Pancasila tidak lagi menjadi ruang negosiasi makna, melainkan menjadi alat kontrol sosial yang digunakan untuk menjaga stabilitas politik.

Lebih jauh, hegemoni ideologis yang dibangun pada masa Orde Baru

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga persuasif, karena bekerja melalui internalisasi nilai yang dikontrol oleh negara. Kritik terhadap pemerintah sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi negara, sehingga ruang demokrasi menjadi terbatas. Dengan demikian, Pancasila pada masa ini berfungsi sebagai ideologi hegemonik yang memperkuat legitimasi kekuasaan negara.

Krisis multidimensional yang terjadi pada akhir Orde Baru menjadi titik penting dalam perubahan makna Pancasila. Nasoha et al. (2024) menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem politik dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Ketimpangan sosial, korupsi, dan lemahnya demokrasi menunjukkan adanya jarak antara ideologi dan praktik.

Era Reformasi kemudian membuka ruang baru dalam pemaknaan Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila tidak lagi dipaksakan melalui penafsiran tunggal, tetapi menjadi ideologi terbuka yang dapat diinterpretasikan secara plural. Riantono (2021) menegaskan bahwa Pancasila pada era Reformasi berfungsi sebagai ruang diskursif

yang memungkinkan berbagai aktor sosial untuk berpartisipasi dalam proses pemaknaan ideologi.

Perubahan ini sejalan dengan perkembangan demokrasi yang menekankan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik. Nasoha et al. (2024) menambahkan bahwa reinterpretasi Pancasila menjadi penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk perubahan nilai sosial dan perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi cara masyarakat memahami ideologi negara.

Namun demikian, keterbukaan tersebut juga membawa tantangan baru. Secara struktural, masih terdapat inkonsistensi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Secara kultural, pluralitas tafsir yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang mendalam berpotensi menimbulkan fragmentasi makna ideologi.

Dalam perspektif wacana, kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila terus berada dalam proses negosiasi makna yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan dinamika sosial. Ideologi negara tidak lagi dimonopoli oleh negara, tetapi juga diproduksi dalam ruang publik melalui

media, pendidikan, dan praktik sosial lainnya.

Dengan demikian, transformasi makna Pancasila dapat dipahami sebagai proses dialektika antara ideologi, kekuasaan, dan masyarakat. Setiap periode sejarah menghadirkan konteks yang berbeda, sehingga menghasilkan konstruksi makna yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang statis, melainkan entitas yang hidup dan terus berkembang.

Lebih jauh, dalam konteks kontemporer, penting untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi reflektif yang tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga kritis. Artinya, Pancasila perlu terus dikaji, ditafsirkan, dan direlevansikan dengan kondisi sosial yang berubah. Tanpa upaya tersebut, terdapat risiko bahwa Pancasila akan kembali mengalami reduksi makna, baik sebagai doktrin formal maupun sebagai simbol politik yang kehilangan substansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mengalami transformasi makna yang bersifat dinamis, kontekstual, dan dialektis. Transformasi tersebut dipengaruhi

oleh faktor historis, politik, dan sosial yang membentuk relasi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kritis dan kontekstual menjadi sangat penting agar ideologi ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era global dan demokratis saat ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak bersifat statis, melainkan mengalami transformasi makna yang dinamis seiring dengan perubahan konfigurasi kekuasaan dan konteks sosial-politik pada setiap periode sejarah Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai *common platform* yang merepresentasikan kompromi ideologis dan berperan sebagai instrumen integrasi nasional dalam masyarakat yang plural. Memasuki masa Orde Lama, Pancasila mulai mengalami ideologisasi yang lebih kuat, di mana maknanya bergeser tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai alat legitimasi

politik dalam proses konsolidasi kekuasaan.

Transformasi tersebut mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, ketika Pancasila diinstitusionalisasikan secara sistematis melalui berbagai kebijakan negara dan dimaknai secara hegemonik melalui penafsiran tunggal. Dalam konteks ini, Pancasila tidak lagi menjadi ruang diskursif yang terbuka, melainkan berfungsi sebagai instrumen kontrol ideologis yang membatasi pluralitas interpretasi. Sementara itu, era Reformasi menghadirkan perubahan signifikan dengan membuka kembali ruang interpretasi terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka yang adaptif terhadap dinamika masyarakat demokratis. Namun demikian, keterbukaan tersebut juga diiringi oleh tantangan berupa inkonsistensi implementasi dan lemahnya internalisasi nilai dalam praktik sosial dan politik.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa makna Pancasila senantiasa diproduksi dan direproduksi melalui relasi antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami

sebagai dasar negara dalam pengertian normatif, tetapi juga sebagai wacana ideologis yang terus dinegosiasikan dalam konteks historis yang berubah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kritis dan kontekstual agar tetap relevan sebagai landasan ideologis dalam kehidupan demokrasi Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. (2023). Sejarah dan perjalanan sila pertama Pancasila dari era Orde Lama sampai era Reformasi (SBY). *Davar: Jurnal Teologi*, 4(1), 21–35.
- Aurora, P. A. (2024). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).
- Aurora. (2020). *Pancasila sebagai ideologi negara pada masa Orde Baru. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 115–128.
- Budiman, I. F. (2024). Peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(3), 47–54.
- Ismaya, F. (2025). Relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara di era modern. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(3), 26–37.
- Julian, R. D. (2021). Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. *Pracetak OSF*, 1–22.
- Kabanga, L., Tabuni, S., & Kalangi, A. N. (2023). Ideologi dalam pesan paskah 2023: pendekatan analisis wacana kritis dengan model Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(4), 1095-1110.
- Masitoh, M. (2020). Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis. *Edukasi Lingua Sastra*, 18(1), 66-76.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Salsabila, N. A., Syarifah, N. A., Larassati, S., & Marzuki, M. I.

- (2024). Pancasila era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(4), 32–56.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Widiya, A. A., Wulandari, R., Triatmojo, R. M. S., & Nugraheni, A. (2024). Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 379–395.
- Nasoha, M., et al. (2024). *Transformasi makna Pancasila dalam perspektif analisis wacana kritis. Jurnal Tuturan*, 12(2), 379–395.
- Rahmi, A., Syahrul, A. F., Siregar, I. P. A., Pelawi, M. S. S., Hasanah, N., & Siregar, R. N. (2025). Sistem etika politik dan ideologi negara dalam Pancasila. *JURNAL TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2), 85–95.
- Riantono, A. (2021). *Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam dinamika politik Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45–60.
- Riantono, M. (2021). *Perkembangan tafsir Pancasila dari era Orde Lama sampai era Reformasi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Samekto, A., & Purwanti, D. (2017). *Demokrasi dan penyimpangan nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Jurnal Civics*, 14(1), 67–78.
- Silaswati, D. (2019). Analisis wacana kritis dalam pengkajian wacana. *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 12(1), 1-10.
- Wiratama, N. S., Budianto, A., & Sumarwoto, M. I. Z. I. (2022). Pancasila dan NASAKOM dalam mempersatukan bangsa Indonesia: *Kajian kritis sejarah intelektual. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 66–76.
- Zahra, R. L., Sari, M. P., Saputra, I. M., Fuadah, M. N., Luthfiah, R. W., Herawati, H., & Gustaman, R. F. (2025). Perkembangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. *Cendekia:*

Jurnal Pendidikan dan
Pemberdayaan Masyarakat,
3(1), 30–37.